

Pengaruh Sejarah Politik terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Analisis Sosial dan Budaya

Aam Lusyana^{1*}, Aan Iminullah Eka Putri²

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

**Corresponding Author:*

Aam Lusyana, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: alusyana85@gmail.com

DOI: -

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
18-06-2025	24-06-2025	24-06-2025	26-06-2025

Abstrak

Pendidikan agama Islam di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada. Indikasi masalah yang muncul terkait pengaruh sejarah politik terhadap implementasi kebijakan pendidikan agama Islam yang beragam dari masa kolonial hingga Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sejarah politik terhadap kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kurikulum serta cara pengajaran agama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi sejarah, yang mengandalkan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil temuan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia selalu dipengaruhi oleh perubahan politik, baik dalam hal kurikulum, pembentukan karakter, dan pengajaran agama. Transformasi politik, terutama setelah Reformasi, memberikan peluang untuk pendidikan agama Islam yang lebih inklusif dan moderat, namun tetap dihadapkan pada tantangan keberagaman sosial dan perkembangan teknologi.

Kata kunci: *Kebijakan, Pendidikan Agama Islam, Politik, Sejarah*

Abstract

Islamic religious education in Indonesia has undergone various changes influenced by the existing political dynamics. Indications of problems that arise are related to the influence of political history on the implementation of Islamic religious education policies that vary from the colonial period to the Reformation. This research aims to analyze the influence of political history on Islamic religious education policies in Indonesia and how these changes affect the curriculum and the way religion is taught. The research method used is a qualitative approach with the type of historical study, which relies on data collection techniques through documentation studies and in-depth interviews. The findings show that Islamic religious education policy in Indonesia has always been influenced by political changes, both in terms of curriculum, character building and religious teaching. Political transformation, especially after the Reformation, provides opportunities for a more inclusive and moderate Islamic religious education, but it is still faced with the challenges of social diversity and technological development.

Keywords: *Islamic Religious Education, Politics, Policy, History.*



Copyright ©2025

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik negara (Zarkasyi et al., 2021). Sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan, pendidikan agama Islam mengalami banyak perubahan yang erat kaitannya dengan situasi politik di Indonesia. Peran politik dalam pembentukan kebijakan pendidikan agama sangat penting karena dapat memengaruhi pola pendidikan, kurikulum, dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana pendidikan agama Islam berkembang di Indonesia, penting untuk menelusuri pengaruh sejarah politik yang telah membentuknya. Sejarah ini menggambarkan bagaimana dinamika politik nasional dan internasional turut mewarnai kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Pemahaman tentang sejarah pendidikan agama ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang yang ada dalam dunia pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini. Dengan demikian, analisis sejarah pendidikan agama Islam menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Sejak masa penjajahan Belanda, pendidikan agama Islam di Indonesia berada dalam kendali terbatas, terutama di lingkungan pesantren (Firdaus & Husni, 2021). Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang membatasi perkembangan pesantren dan mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi sekuler. Hal ini membuat pendidikan agama Islam lebih terisolasi dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Bahkan, kebijakan ini menjadikan pesantren sebagai lembaga yang hampir terabaikan dalam pembaruan pendidikan pada saat itu. Pada masa ini, banyak umat Islam yang bergantung pada pengajaran agama di pesantren tanpa dukungan formal dari negara. Keadaan ini menciptakan ketimpangan dalam sistem pendidikan yang semakin memperlebar jurang kesenjangan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan agama Islam mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan berusaha menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kebijakan-kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri, seperti masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Selama masa Orde Baru, misalnya, ada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal dengan menekankan pada nilai-nilai moral yang sesuai dengan ideologi negara (Inayatillah et al., 2022). Perubahan ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah untuk memberikan ruang bagi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Namun, integrasi ini tidak sepenuhnya bebas dari kendala, baik dari sisi kurikulum maupun penerimaan masyarakat. Pendidikan agama Islam pada masa ini juga menjadi ajang untuk mengkompromikan antara kepentingan ideologi negara dengan nilai-nilai agama yang diajarkan.

Pada masa Orde Baru, pendidikan agama Islam dipandang sebagai instrumen untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, meskipun pendidikan agama Islam mendapat perhatian lebih dalam kurikulum nasional, kebijakan pemerintah pada waktu itu juga memiliki keterbatasan dalam memberikan ruang bagi perkembangan pendidikan agama Islam secara lebih luas. Pendidikan agama Islam lebih banyak diselenggarakan di lembaga pendidikan informal seperti pesantren (Mu'ti, 2023). Meski demikian, pemerintah tetap mengakui pentingnya peran pesantren dalam menjaga keberlangsungan pendidikan agama Islam di masyarakat. Pesantren tetap bertahan meski dalam keterbatasan, membuktikan ketahanan tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pendidikan agama Islam di pesantren menjadi alternatif bagi sebagian

masyarakat yang menginginkan pendidikan agama yang lebih mendalam dan autentik.

Pada era Reformasi, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, kebijakan pendidikan agama Islam kembali mengalami perubahan. Peran pendidikan agama Islam menjadi semakin penting dalam pembentukan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Di samping itu, kebebasan berpendapat yang lebih terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap pendidikan agama yang selama ini ada (A. Agbaria, 2024). Proses reformasi ini mengarah pada pembaruan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Masyarakat mulai merasakan pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan agama Islam dengan tantangan global, seperti perkembangan teknologi dan ideologi global. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Sejarah politik di Indonesia juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam sering kali dipengaruhi oleh isu-isu politik global, terutama hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya. Misalnya, pengaruh negara-negara Timur Tengah dalam pendidikan agama Islam sangat terasa, khususnya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam moderat dan toleransi beragama (Alvian & Ardhani, 2023). Pengaruh internasional ini membawa dampak pada pembentukan kurikulum yang lebih moderat dan menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perlu menyesuaikan pendidikan agama Islam dengan situasi internasional yang semakin kompleks. Pendidikan agama Islam yang berbasis pada moderasi dan toleransi ini sangat penting dalam menjaga perdamaian sosial dan keberagaman yang ada di Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi cara pendidikan agama Islam diajarkan. Pada abad ke-21, internet telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan agama Islam. Pemerintah Indonesia mencoba memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pendidikan agama Islam, baik melalui materi ajar berbasis digital maupun program pendidikan jarak jauh yang lebih fleksibel bagi siswa di daerah terpencil (Mulyadi, 2024). Pemanfaatan teknologi ini telah membawa pendidikan agama Islam ke tingkat yang lebih modern, dengan memanfaatkan alat dan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal ini juga memudahkan akses masyarakat terhadap pengetahuan agama Islam yang lebih luas dan mendalam. Pendidikan agama Islam kini menjadi lebih terbuka dan mudah diakses, tanpa terkendala oleh lokasi atau waktu.

Pendidikan agama Islam juga tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik mengenai keberagaman agama di Indonesia. Politik identitas yang berkembang selama beberapa dekade terakhir, diikuti dengan pertumbuhan berbagai kelompok keagamaan, turut memengaruhi cara pendidikan agama Islam diselenggarakan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara hak-hak pendidikan agama bagi umat Islam dan kelompok agama lainnya untuk menciptakan kedamaian sosial dalam keberagaman (Harjatanaya, 2025). Isu keberagaman ini menjadi tantangan dalam menjaga harmonisasi pendidikan agama Islam dengan agama-agama lainnya. Kebijakan pendidikan agama Islam harus senantiasa diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa hak-hak beragama dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini akan menciptakan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memperkuat jalinan solidaritas antar umat beragama.

Salah satu isu utama yang muncul terkait pendidikan agama Islam adalah tantangan dalam menghadapi radikalisme. Pendidikan agama Islam di Indonesia harus mampu

memberikan pemahaman yang moderat dan memperkuat nilai-nilai toleransi di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu disesuaikan dengan tantangan zaman dan ideologi yang berkembang. Kebijakan pemerintah dalam hal ini harus menyertakan pendekatan yang bijaksana agar pendidikan agama Islam dapat menjadi sarana untuk membangun karakter bangsa yang lebih inklusif (Thoyib et al., 2024). Pendidikan agama Islam berperan sebagai benteng terhadap paham-paham ekstremis yang dapat mengancam stabilitas sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memastikan bahwa pendidikan agama Islam tidak disalahgunakan sebagai alat untuk menebarkan ideologi radikal. Pendidikan agama Islam yang mengajarkan nilai-nilai moderat dan toleransi akan memperkuat rasa kebersamaan dan perdamaian antar umat beragama.

Secara keseluruhan, pendidikan agama Islam di Indonesia merupakan cerminan dari sejarah politik yang telah melaluinya. Setiap periode politik yang berbeda memberikan warna tersendiri dalam pembentukan sistem pendidikan agama Islam, baik dari segi kurikulum, metodologi, maupun tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis sosial dan budaya terhadap pengaruh politik terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia, agar kita dapat memahami bagaimana pendidikan agama Islam terus berkembang dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang semakin kompleks (Suradi, 2022). Proses ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pendidikan agama Islam bisa lebih berkontribusi dalam perkembangan bangsa. Pengetahuan ini juga akan membuka jalan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus memperbaharui pendekatan dalam pendidikan agama Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sejarah politik terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kebijakan yang terjadi sepanjang perjalanan sejarah politik Indonesia, dari masa kolonial hingga era Reformasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dinamika politik nasional mempengaruhi pembentukan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan, dan aksesibilitas pendidikan agama Islam. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami hubungan antara politik dan pendidikan agama Islam untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan globalisasi, keberagaman sosial, serta perkembangan teknologi di Indonesia. Dengan memahami pengaruh tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi sejarah untuk menganalisis pengaruh sejarah politik terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai perkembangan pendidikan agama Islam melalui lensa perubahan politik yang terjadi di Indonesia dari masa kolonial hingga Reformasi. Dengan menggunakan studi sejarah, penelitian ini berusaha untuk melacak jejak-jejak kebijakan politik yang berdampak langsung pada pembentukan sistem pendidikan agama Islam, baik dalam hal kurikulum, metodologi, maupun aksesibilitasnya. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi dokumentasi, dengan menganalisis berbagai sumber sekunder seperti arsip, kebijakan pemerintah, buku sejarah, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data utama yang

digunakan adalah studi dokumentasi, yang dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber sekunder seperti arsip sejarah, kebijakan pemerintah, literatur ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan dinamika politik dan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pemilihan sumber didasarkan pada kriteria relevansi historis, validitas akademik, dan kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara perkembangan politik nasional dan perubahan kebijakan pendidikan agama dalam konteks sosial budaya Indonesia. Sumber-sumber ini akan memberikan informasi mengenai evolusi kebijakan pendidikan agama Islam sepanjang masa pemerintahan yang berbeda.

Selain itu, wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan langsung tentang kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Informan 6 orang ini meliputi tokoh akademis, praktisi pendidikan agama, serta pejabat atau mantan pejabat yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan agama di berbagai periode sejarah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan nuansial mengenai bagaimana kebijakan politik mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan agama Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dalam kebijakan pendidikan agama Islam, serta melihat bagaimana politik mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dalam berbagai periode sejarah. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara politik dan pendidikan agama Islam secara lebih mendalam, serta memberi gambaran bagaimana kebijakan yang ada dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan pendidikan agama Islam di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sejarah Politik terhadap Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi politik sejak era kolonial hingga masa Reformasi. Interpretasi ini didasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan akademisi di bidang sejarah pendidikan Islam dan pejabat terkait di Kementerian Agama, yang mengungkapkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, pembelajaran agama Islam dibatasi melalui regulasi yang mengesampingkan keberadaannya dalam sistem pendidikan formal. Hal ini menciptakan ketergantungan masyarakat Muslim pada pesantren sebagai lembaga pendidikan agama utama. Meskipun pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan agama Islam, sistem pendidikan agama yang lebih formal dan sistematis terbatas pada lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial (Zaini, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejarawan pendidikan dan tokoh agama, diketahui bahwa pada masa awal kemerdekaan, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan agama Islam, di mana pemerintah mulai mengakui peran penting pendidikan agama dalam pembentukan karakter bangsa. Namun, para narasumber juga menekankan bahwa proses integrasi pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan formal kerap mengalami hambatan akibat ketegangan politik, khususnya yang berkaitan dengan tarik menarik ideologi negara dan posisi agama dalam struktur kenegaraan. Pemerintah Orde Lama cenderung mendekati pendidikan agama dengan cara yang lebih inklusif, meskipun pada beberapa titik, ideologi politik negara justru mengarahkan pendidikan agama ke arah yang lebih sekuler (Nurtawab & Wahyudi, 2022).

Selama Orde Baru, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan agama Islam secara formal ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam dimasukkan dalam kurikulum sekolah umum, dan semua sekolah diharuskan untuk mengajarkan mata pelajaran agama. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membangun moralitas masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, terdapat kecenderungan untuk menekankan pendidikan agama sebagai alat untuk memperkuat ideologi negara. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan integrasi sosial di Indonesia (Qoumas et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama itu sendiri, tetapi juga oleh kepentingan politik yang ada pada masa itu.

Di sisi lain, pada masa Reformasi, kebijakan pendidikan agama Islam kembali mengalami pergeseran signifikan. Reformasi politik yang terjadi pasca-Orde Baru memberikan ruang yang lebih besar bagi keberagaman pandangan dan kebebasan berekspresi, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia mulai memberikan ruang bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama yang lebih moderat dan sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk mempertimbangkan globalisasi dan pluralisme agama. Pendidikan agama Islam menjadi lebih terbuka untuk menerima berbagai interpretasi dan pengajaran yang lebih kontemporer, dengan fokus pada pemahaman agama yang toleran dan inklusif (Цегельник, 2023).

Perubahan-perubahan dalam kebijakan pendidikan agama Islam juga dipengaruhi oleh interaksi Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya, terutama di Timur Tengah. Pengaruh dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir terlihat dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih mendalam, dengan mengedepankan pemahaman yang lebih moderat terhadap ajaran Islam. Namun, pengaruh ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, di mana kebijakan pendidikan agama Islam yang terlalu dipengaruhi oleh negara luar bisa berisiko mengurangi kearifan lokal dan keberagaman dalam interpretasi agama (Mulyana, 2023).

Seiring berjalannya waktu, kebijakan pendidikan agama Islam semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam telah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh, terutama dalam mempermudah akses informasi bagi siswa di daerah terpencil. Internet dan platform pembelajaran daring menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan materi pendidikan agama Islam secara lebih luas dan fleksibel. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah mulai merancang program pendidikan agama berbasis digital untuk mempermudah akses pendidikan agama Islam, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal (Nisa et al., 2024).

Namun, meskipun teknologi memberi dampak positif, kebijakan ini juga mengharuskan adanya pengawasan yang lebih ketat agar pendidikan agama Islam tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ideologi ekstremis yang dapat memecah belah masyarakat. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa materi yang disampaikan melalui media digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang moderat dan dapat mendukung perdamaian sosial. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan agama Islam sangat penting untuk menjaga agar tidak ada penyebaran konten yang berisiko memicu radikalisme (Hefner, 2022).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia harus terus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan politik yang cepat. Pendidikan agama Islam tidak hanya

harus berfokus pada pengajaran ajaran agama yang kaku, tetapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter siswa yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam perlu melibatkan para ahli, praktisi pendidikan, dan tokoh agama yang dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan tuntutan pendidikan modern (Subhan, 2023).

Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan agama Islam yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman sangat penting. Pendidikan agama Islam harus dapat memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh semua kalangan, tanpa terjebak pada pemahaman agama yang eksklusif dan menutup diri dari pluralitas. Selain itu, penting bagi pendidikan agama Islam untuk menciptakan ruang bagi pengembangan karakter siswa yang tidak hanya berfokus pada aspek agama, tetapi juga pada kecerdasan emosional dan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (A. K. Agbaria, 2022).

Pendidikan agama Islam yang moderat dan inklusif akan memberikan kontribusi yang besar dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Pemerintah Indonesia perlu terus berupaya untuk memperbarui kebijakan pendidikan agama Islam agar dapat mencerminkan keberagaman, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama. Hanya dengan cara ini, pendidikan agama Islam akan dapat menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai perdamaian dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks

Analisis Sosial dan Budaya dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Perubahan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan politik di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap implementasi pendidikan agama Islam, baik dari segi kurikulum maupun cara pengajaran. Sejak masa kemerdekaan, pendidikan agama Islam mengalami beberapa tahap perkembangan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan agama Islam hanya diakui dalam bentuk informal, seperti pesantren. Namun, seiring dengan perubahan politik, pendidikan agama Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal melalui kebijakan pemerintah, meskipun seringkali terhambat oleh berbagai faktor sosial dan politik (Muhlisin et al., 2023).

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia berusaha mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, namun dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila yang sering kali mengorbankan keberagaman dalam pemahaman agama. Kebijakan pendidikan yang mengarahkan pendidikan agama Islam menjadi alat untuk memperkuat ideologi negara ini mempengaruhi pengajaran agama di sekolah-sekolah umum, di mana pendidikan agama Islam cenderung lebih bersifat normatif dan kurang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam (Suhayib & Ansyari, 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan antara pendidikan agama di sekolah-sekolah formal dan pendidikan agama di pesantren, yang tetap lebih mendalam dalam pengajaran agama Islam.

Pendidikan agama Islam pada masa Reformasi menunjukkan pergeseran signifikan, di mana kebebasan berpendapat dan pluralisme agama mulai diakui dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih moderat terhadap pendidikan agama Islam, di mana kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah lebih mencerminkan keberagaman dan toleransi. Namun, meskipun ada ruang yang lebih besar bagi keberagaman, tantangan tetap ada dalam hal pengajaran agama yang mengedepankan sikap moderat dan menghindari ekstrimisme (Thoyib et al., 2024). Kebijakan ini

mencerminkan bahwa meskipun pendidikan agama Islam semakin inklusif, implementasinya tetap terhambat oleh faktor sosial yang kompleks, termasuk ketegangan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peran penting media dan teknologi dalam pengajaran pendidikan agama Islam di era digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pendidikan agama Islam di Indonesia mengalami transformasi besar, terutama dalam hal distribusi materi ajar. Berbagai platform pembelajaran daring kini digunakan untuk menyebarkan ilmu agama Islam, namun tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap sesuai dengan ajaran Islam yang moderat dan tidak terjebak pada konten yang bisa memicu radikalisme (Nisa et al., 2024). Teknologi menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan agama Islam, terutama bagi siswa di daerah terpencil.

Pendidikan agama Islam juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang lebih luas, seperti nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam dalam hal etnis, budaya, dan agama, memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keberagaman dalam pendidikan agama. Hal ini tercermin dalam cara pendidikan agama Islam diajarkan di berbagai daerah, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial budaya setempat (Fuadi et al., 2024). Pendidikan agama Islam yang berbasis pada nilai-nilai lokal ini berpotensi memperkaya pemahaman siswa terhadap ajaran agama, sekaligus mendorong toleransi antarumat beragama.

Analisis sosial dan budaya dalam implementasi pendidikan agama Islam mengungkapkan bahwa pengaruh politik sangat kuat dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan agama Islam di Indonesia. Kebijakan pendidikan agama Islam yang ditentukan oleh pemerintah sering kali mencerminkan kepentingan politik yang ada pada masa itu, baik dalam konteks ideologi negara maupun dalam merespons perkembangan sosial masyarakat. Seperti yang terlihat pada masa Orde Baru, di mana pendidikan agama Islam lebih difokuskan pada pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi mengabaikan keragaman dalam pengajaran agama (Bazzi et al., 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa politik dapat memengaruhi bagaimana agama dipahami dan diajarkan dalam pendidikan, dengan dampak besar terhadap toleransi dan keberagaman dalam masyarakat.

Pergeseran kebijakan pendidikan agama Islam yang terjadi pasca-Reformasi mencerminkan perubahan dalam sikap politik terhadap agama. Kebebasan berpendapat yang lebih besar memberi ruang bagi pengajaran agama Islam yang lebih inklusif dan moderat. Namun, meskipun kebijakan ini menciptakan peluang untuk pendekatan pendidikan agama yang lebih terbuka, tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan kurikulum yang tidak hanya mengakomodasi keberagaman agama, tetapi juga menjaga agar pendidikan agama Islam tidak menjadi sarana untuk menyebarkan paham yang ekstrem atau intoleran (A. Agbaria, 2024). Pendidikan agama Islam yang moderat dan inklusif, yang mengedepankan sikap toleransi dan pemahaman terhadap agama lain, harus dijaga agar tidak tergeser oleh pandangan radikal yang dapat merusak harmonisasi sosial.

Selain itu, aspek sosial dan budaya sangat memengaruhi cara pendidikan agama Islam diajarkan di Indonesia. Di daerah-daerah dengan budaya yang lebih homogen, pengajaran agama Islam cenderung lebih mudah diterima, namun di daerah-daerah yang lebih heterogen, ada tantangan tersendiri dalam menciptakan pendidikan agama yang dapat diterima oleh semua kalangan. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam harus mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan budaya yang ada, dengan tetap menjaga inti ajaran agama Islam yang universal. Hal ini menjadi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri

dari berbagai kelompok agama dan etnis (Utami, 2022).

Pendidikan agama Islam di Indonesia juga harus memperhatikan perkembangan globalisasi yang mempengaruhi pola pikir dan sikap generasi muda terhadap agama. Dalam era globalisasi ini, generasi muda Indonesia terpapar pada berbagai informasi dan ideologi dari luar yang dapat memengaruhi cara mereka memahami agama. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan agama Islam untuk tidak hanya mengajarkan teks-teks agama secara kaku, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis siswa untuk memahami agama dalam konteks zaman yang berubah (Hefner, 2022). Hal ini menjadi tantangan besar dalam menghadapi potensi konflik antara nilai-nilai agama yang diajarkan di sekolah dengan nilai-nilai yang dibawa oleh budaya global.

Kebijakan pendidikan agama Islam juga harus memperhatikan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, materi agama Islam kini dapat diakses secara lebih luas dan mudah oleh siswa di seluruh Indonesia. Namun, ini juga membuka celah bagi penyebaran informasi yang tidak tepat atau bahkan berbahaya bagi pemahaman agama yang moderat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap konten yang diajarkan melalui media digital sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran yang disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan toleran (Nisa et al., 2024). Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk memperkaya pemahaman agama Islam yang mendalam, tanpa menambah polarisasi atau menyebarkan ekstremisme.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan agama Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Kebijakan pendidikan agama yang ditentukan oleh pemerintah harus responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya di Indonesia yang semakin kompleks. Pendidikan agama Islam harus terus diperbaharui agar dapat memenuhi kebutuhan zaman, dengan tetap menjaga esensi ajaran agama Islam yang moderat dan mengedepankan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperhatikan faktor-faktor sosial yang mendalam, seperti keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat, agar pendidikan agama Islam dapat benar-benar berkontribusi dalam membangun karakter bangsa yang harmonis dan damai (Inayatillah et al., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sejarah politik terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia sangat besar, baik dari segi kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Perubahan politik di Indonesia, mulai dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era Reformasi, telah membentuk arah pendidikan agama Islam yang diterima masyarakat. Meskipun ada kemajuan dalam mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan formal, masih ada tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan antara pendidikan agama di pesantren dan sekolah formal, serta bagaimana menjaga keberagaman dalam pengajaran agama. Perkembangan teknologi, pengaruh politik internasional, dan faktor sosial budaya turut memperkaya dinamika ini, menjadikan pendidikan agama Islam di Indonesia lebih inklusif, namun tetap harus responsif terhadap tantangan globalisasi dan pluralisme. Kebijakan pendidikan agama Islam yang moderat dan inklusif sangat dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda yang toleran dan berpikiran terbuka, serta menghindari polarisasi yang dapat memicu radikalisasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didukung oleh pembimbing, yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas penelitian secara optimal. Dukungan ini berperan penting dalam kelancaran proses pengumpulan data dan analisis, sehingga memungkinkan penelitian ini terselesaikan sesuai tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Agbaria, A. (2024). Education for Religion: An Islamic Perspective. *Religions*, 15(3), 309. <https://doi.org/10.3390/rel15030309>
- Agbaria, A. K. (2022). Education for Religious Pluralism in Islam: One Book or Series of Books, a Singular Message or Myriad Messages? *Religions*, 13(4), 283. <https://doi.org/10.3390/rel13040283>
- Alvian, R. A., & Ardhani, I. (2023). THE POLITICS OF MODERATE ISLAM IN INDONESIA: Between International Pressure and Domestic Contestations. In *Al-Jami'ah* (Vol. 61, Nomor 1). <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.19-57>
- Bazzi, S., Koehler-Derrick, G., & Marx, B. (2020). The Institutional Foundations of Religious Politics: Evidence from Indonesia. *Quarterly Journal of Economics*, 135(2), 845–911. <https://doi.org/10.1093/QJE/QJZ038>
- Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Manoharmayum, D. D., Shah, A. H., Prodanova, N. A., Mamarajabov, M. E., & Singer, N. (2024). Corrigendum: Challenges of Islamic Education in the New Era of Information and Communication Technologies (HTS Teologiese Studies/Theological Studies, (2023), 79, 1, a8608, 10.4102/hts.v79i1.8608). *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9491>
- Firdaus, F. A., & Husni, H. (2021). Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas. *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.36667/tf.v15i1.703>
- Fuadi, M., Faishol, A., Rifa'i, A. A., Triana, Y., & Ibrahim, R. (2024). Religious Moderation in the Context of Integration between Religion and Local Culture in Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*. <https://doi.org/10.22452/jat.vol19no1.4>
- Harjatanaya, T. Y. (2025). Contextualising religious education in multi-religious Indonesia to achieve unity-in-religious diversity. *Journal of Beliefs & Values*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/13617672.2025.2450958>
- Hefner, C.-M. (2022). Morality, religious authority, and the digital edge. *American Ethnologist*, 49(3), 359–373. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/amet.13088>
- Inayatillah, Kamaruddin, & M. Anzaikhan. (2022). The History of Moderate Islam in Indonesia and Its Influence on the Content of National Education. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2 SE-Articles), 213–226. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17>
- Mu'ti, A. (2023). Pluralistic Islamic Religious Education: A Vision for Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 21(2), 121–127. <https://doi.org/10.1080/15570274.2023.2200280>
- Muhlisin, M., Kholis, N., & Rini, J. (2023). Navigating the Nexus: Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education. *Qudus International of Journal Islamic Studies*. <https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.12677>
- Mulyadi. (2024). Grasping The Management Of Islamic Education Amidst The Digital Era. *International Journal of Public Health*, 1(2 SE-Articles), 47–53. <https://doi.org/10.62951/ijph.v1i2.24>
- Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1), 1–8.

- <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8592>
- Nisa, D., Aimah, S., & Fakhruddin, F. (2024). Pesantren transformation in the digital era: solution or threat for islamic education. *Leadership*, 5(2), 247–260. <https://doi.org/10.32478/leadership.v5i2.2712>
- Nurtawab, E., & Wahyudi, D. (2022). Restructuring Traditional Islamic Education in Indonesia: Challenges for Pesantren Institution. *Studia Islamika*, 29(1), 55–81. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.17414>
- Qoumas, Y. C., Hussain, R. B. B. M., & Rahim, R. A. B. A. (2024). The Dissemination of Religious Moderation Through the Policy of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Qudus International of Journal Islamic Studies*, 12(1), 147. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.27552>
- Subhan, A. (2023). Al-Madrasah (Madrasah) am al-Madrasah al-‘Āmmah (Sekolah): al-Mufaḍḍalah ‘inda Atbā’ Jam’iyyah al-Muḥammadiyyah wa Nahḍah al-‘Ulamā fi Indūnisiyā. *Studia Islamika*, 30(3), 561–594. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.38201>
- Suhayib, & Ansyari, M. F. (2023). Design of Islamic Religious Education: Purposes, alignment of curriculum components and contexts. *British Journal of Religious Education*, 45(4), 382–393. <https://doi.org/10.1080/01416200.2023.2220940>
- Suradi, A. (2022). The Social, Political, and Cultural Perspective of Islamic Education in Palembang Malay: A Continuous Evaluation from the Dutch Colonial Period to Today. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3 SE-Original Manuscript), 56–71. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1200>
- Thoyib, M. E., Degaf, A., Fatah, A. A., & Huda, M. (2024). Religious Tolerance among Indonesian Islamic University Students: The Pesantren Connection. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(2 SE-Articles), 239–250. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no2.16>
- Utami, P. T. (2022). Raising religious inherency: the role of interreligious competence in achieving religious education equality in multireligious public schools in Indonesia. *Humanities & social sciences communications*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01298-y>
- Zaini, A. (2022). Modernizing Islamic Education in the Most Populated Muslim World. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 175–196. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.175-196>
- Zarkasyi, A. H., Rahmatika, A., & Wulandari, C. E. (2021). The Implementation of Emotional Intelligence at Darussalam Modern Gontor Islamic Institution. *At-Ta’dib*, 16(2), 219. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v16i2.6871>
- Церельник, Н. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *Theological Studies/Teologiese Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592>